



## Peran Kepemimpinan Parsitipatif PPTK Mengelola Fasilitas Kegiatan Hari Besar di Langkat

Citra Patmasari<sup>1</sup>, Fathiyah Salsabila Lubis<sup>2</sup>, Nabila Azzahra Putri Irwansyah<sup>3</sup>, Rahma Putri Inaya Harahap<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan

Email : [citrafadmasari@gmail.com](mailto:citrafadmasari@gmail.com)<sup>1</sup>, [fathiyahsalsa07@gmail.com](mailto:fathiyahsalsa07@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[nabilaazzahraaputri05@gmail.com](mailto:nabilaazzahraaputri05@gmail.com)<sup>3</sup>, [inayaputri50@gmail.com](mailto:inayaputri50@gmail.com)<sup>4</sup>

### Article Info

#### Article history:

Received September 25, 2025

Revised September 29, 2025

Accepted Oktober 03, 2025

#### Keywords:

PPTK Leadership, Event Facilities, Religious Holidays, Carelessness, Public Services, Social Justice, Langkat Regency

### ABSTRACT

*This study discusses the role of Technical Activity Implementation Officers (PPTK) in planning and managing facilities for religious events at the Langkat Regent's Office, North Sumatra Province. The main focus is on the carelessness of team members in managing facilities such as tents, sound systems, and chairs, which affects the effectiveness of event implementation and public satisfaction, especially among the lower social classes. This study identifies the factors causing this carelessness, including a lack of leadership commitment, weak coordination, and minimal supervision. The social impact of this problem is also analyzed, especially in relation to social justice and community integration. The results of this study are expected to provide recommendations for improving the performance of PPTK and the quality of event facilities in order to create more inclusive and effective public services.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



### Article Info

#### Article history:

Received September 25, 2025

Revised September 29, 2025

Accepted Oktober 03, 2025

#### Kata Kunci :

Kepemimpinan PPTK, Fasilitas Acara, Hari Besar Keagamaan, Ketidakteletian, Pelayanan Publik, Keadilan Sosial, Kabupaten Langkat

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran kepemimpinan Pegawai Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam perencanaan dan pengelolaan fasilitas acara kegiatan hari besar keagamaan di Kantor Bupati Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Fokus utama adalah ketidakteletian anggota tim dalam mengelola fasilitas seperti tenda, sound system, dan kursi yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan acara serta kepuasan masyarakat, khususnya dari kelas sosial bawah. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidakteletian, termasuk kurangnya komitmen kepemimpinan, koordinasi yang lemah, dan pengawasan yang minim. Dampak sosial dari permasalahan ini juga dianalisis, terutama terkait rasa keadilan sosial dan integrasi masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja PPTK dan kualitas fasilitas acara demi terciptanya pelayanan publik yang lebih inklusif dan efektif.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



### Corresponding Author:

Citra Patmasari

Universitas Negeri Medan



## PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan salah satu elemen fundamental dalam dinamika sosial dan pemerintahan, yang berperan penting dalam mengarahkan, mengelola, dan mengoptimalkan berbagai aktivitas masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, kepemimpinan tidak hanya terbatas pada figur pemimpin formal seperti bupati atau camat, tetapi juga melibatkan berbagai aktor di tingkat operasional yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program-program publik. Salah satu peran penting tersebut diemban oleh Pegawai Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang bertanggung jawab langsung dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat luas.

Di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Kantor Bupati sebagai pusat administrasi pemerintahan daerah menjadi contoh nyata bagaimana kepemimpinan di tingkat operasional dapat memengaruhi efektivitas pelayanan publik. PPTK di kantor ini memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa berbagai program dan kegiatan yang dirancang dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Salah satu kegiatan yang menjadi fokus perhatian adalah pelaksanaan acara hari besar keagamaan, seperti perayaan Idul Fitri, Idul Adha, dan Maulid Nabi. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya memiliki nilai ritual dan keagamaan yang tinggi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penting dalam mempererat integrasi sosial antar berbagai kelas masyarakat di Kabupaten Langkat. Perayaan hari besar keagamaan tersebut melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat berbagai lapisan sosial, terutama masyarakat kelas bawah yang sering kali bergantung pada fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam konteks ini, peran PPTK menjadi sangat krusial karena mereka bertanggung jawab dalam pengelolaan fasilitas acara seperti tenda, sound system, kursi, dan peralatan pendukung lainnya yang menjadi kebutuhan dasar agar acara dapat berlangsung dengan baik dan nyaman. Namun, dalam praktiknya, kepemimpinan PPTK sering kali menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.

Salah satu tantangan utama yang muncul adalah ketidaktepatan dalam pengelolaan fasilitas acara. Ketidaktepatan ini mencakup kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan fasilitas, distribusi yang tidak merata, serta pengelolaan yang kurang optimal selama tahap perencanaan dan pelaksanaan. Kondisi ini menyebabkan berbagai masalah teknis dan operasional yang berujung pada ketidaknyamanan peserta acara, terutama masyarakat kelas sosial bawah yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas alternatif. Ketidakefektifan dalam pengelolaan fasilitas ini tidak hanya mengganggu kelancaran acara, tetapi juga berpotensi melemahkan rasa kebersamaan dan keadilan sosial yang seharusnya terbangun melalui kegiatan tersebut.

Lebih jauh lagi, fenomena ketidaktepatan dalam kepemimpinan PPTK ini menimbulkan dampak yang lebih luas, seperti inefisiensi penggunaan anggaran pemerintah daerah yang seharusnya dapat dialokasikan secara lebih tepat guna. Selain itu, ketidakefektifan ini juga merusak citra pemerintahan daerah di mata masyarakat, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam masyarakat yang memiliki stratifikasi



sosial yang jelas, ketidaktelitian dalam pengelolaan fasilitas acara keagamaan dapat memperburuk kesenjangan sosial, di mana kelompok masyarakat kelas atas mungkin tidak merasakan dampak langsung, tetapi kelompok kelas bawah justru mengalami ketidakadilan dan ketidaknyamanan yang signifikan.

Permasalahan ini sering kali berakar pada beberapa faktor utama, antara lain kurangnya koordinasi yang efektif dalam tim PPTK, rendahnya motivasi dan komitmen anggota tim, serta kurangnya pengawasan yang ketat selama proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek kepemimpinan yang efektif sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut. Kepemimpinan yang baik tidak hanya mampu mengelola sumber daya secara efisien, tetapi juga mampu membangun sinergi antar anggota tim, meningkatkan motivasi kerja, serta memastikan pengawasan yang ketat agar setiap tahapan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.

Dengan demikian, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai peran dan tantangan kepemimpinan PPTK dalam pengelolaan fasilitas acara hari besar keagamaan di Kabupaten Langkat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kepemimpinan, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan kegiatan keagamaan yang lebih baik dan berkeadilan sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (*qualitative descriptive research*) yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan detail melalui pengumpulan data yang kaya akan makna, bukan berupa angka. Pendekatan ini dipilih karena fokusnya pada interpretasi konteks, proses, dan interaksi yang terjadi dalam latar alamiah penelitian, sehingga memungkinkan peneliti menggambarkan realitas sosial secara utuh dan terperinci sesuai kondisi di lapangan. Objek penelitian adalah Analisis Kebijakan Ahli Muda yang bekerja di Kantor Bupati Langkat, yang menjadi subjek penelitian secara sengaja untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam. Penelitian dilakukan di Kantor Bupati Langkat, yang beralamat di Jl. Tengku Amir Hamzah No.1, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 208111, dengan waktu pelaksanaan pada hari Jumat, 26 September 2025.

Dalam penelitian ini, definisi operasional variabel difokuskan pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman, pandangan, dan interaksi subjek dalam konteks tugas dan lingkungan kerjanya. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, narasi, catatan lapangan, dan dokumen yang relevan, sehingga memungkinkan peneliti menangkap makna secara holistik dan kontekstual. Bahan utama penelitian meliputi dokumen resmi, catatan observasi, dan transkrip wawancara, sedangkan alat utama yang digunakan adalah panduan wawancara semi-terstruktur dan alat perekam suara untuk memastikan keakuratan data.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan subjek penelitian, observasi partisipatif di lingkungan kerja, serta studi dokumentasi untuk melengkapi dan memperkaya data. Seluruh proses pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk menjaga validitas konteks dan keaslian informasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan



kesimpulan/verifikasi. Proses analisis ini berorientasi pada interpretasi makna dan pola yang muncul dari data, sehingga menghasilkan deskripsi yang komprehensif dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di Kantor Bupati Langkat, diketahui bahwa tugas utama tim ini adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan keagamaan Islam berskala besar di tingkat Kabupaten Langkat. Kegiatan tersebut meliputi perayaan hari besar Islam seperti Isra Mi'raj, Salat Idul Fitri, Salat Idul Adha, Maulid Nabi, Tahun Baru Islam, dan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat kabupaten.

Selain merancang substansi acara, tim juga bertanggung jawab atas aspek administrasi, termasuk mempersiapkan dokumen pendukung untuk setiap kegiatan. Dengan demikian, cakupan tugas tim ini sangat strategis dalam mendukung agenda keagamaan pemerintah daerah. Analis Kebijakan Ahli Muda menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif, yang melibatkan seluruh anggota tim secara aktif dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan. Meskipun keputusan akhir tetap dipegang oleh Analis Kebijakan Ahli Muda sebagai pengambil keputusan tertinggi, proses berlangsung secara demokratis dengan diskusi dan masukan dari anggota tim.

Dalam pelaksanaan tugas, ditemukan permasalahan berupa kurang telitinya anggota tim dalam mempersiapkan detail teknis acara, khususnya dalam hal pemeliharaan, distribusi, dan pengolahan fasilitas pendukung seperti tenda, sound system, kursi, dan peralatan lainnya. Ketidaktepatan ini berpotensi mengganggu kelancaran dan kualitas pelaksanaan acara keagamaan.

Menanggapi permasalahan tersebut, Analis Kebijakan Ahli Muda menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Penyelesaian masalah diawali dengan musyawarah untuk mencari akar permasalahan dan solusi bersama. Proses ini diakhiri dengan nasehat yang tegas namun membimbing agar kesalahan tidak terulang, menunjukkan komitmen pemimpin dalam membina tanggung jawab anggota melalui komunikasi terbuka dan solusi yang konstan.

## **PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tim Analis Kebijakan Ahli Muda memiliki peran yang sangat penting dalam menyukseskan kegiatan keagamaan di Kabupaten Langkat. Dengan tanggung jawab yang mencakup perencanaan hingga administrasi, tim ini menjadi ujung tombak dalam memastikan agenda keagamaan pemerintah daerah terlaksana dengan baik. Hal ini sejalan dengan teori manajemen publik yang menekankan pentingnya koordinasi dan perencanaan dalam pelaksanaan program pemerintah (Robbins, 2013).

Gaya kepemimpinan partisipatif yang diterapkan memungkinkan anggota tim merasa dilibatkan dan dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini dapat meningkatkan motivasi dan komitmen anggota, serta menghasilkan keputusan yang lebih matang karena mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Namun, tetap adanya pengambilan



keputusan akhir oleh pimpinan menunjukkan keseimbangan antara demokrasi dan hierarki, yang penting untuk menjaga kesejahteraan dan tanggung jawab (Likert, 1961).

Permasalahan ketidaktepatan dalam pengelolaan fasilitas pendukung acara menjadi tantangan nyata yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan pelatihan teknis bagi anggota tim agar aspek logistik dapat dikelola dengan lebih baik. Menurut teori manajemen operasional, perhatian terhadap detail teknis dan logistik sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan acara (Heizer & Render, 2014).

Pendekatan musyawarah dan diskusi yang diterapkan pimpinan dalam menangani masalah ketidaktepatan mencerminkan praktik kepemimpinan yang humanis dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia. Dengan mengedepankan komunikasi terbuka dan solusi bersama, pimpinan tidak hanya menyelesaikan masalah tetapi juga membangun budaya tanggung jawab dan profesionalisme dalam tim. Hal ini sesuai dengan prinsip kepemimpinan transformasional yang menekan pelatihan dan pemberdayaan anggota (Bass & Riggio, 2006). Kombinasi antara peran strategis, gaya kepemimpinan partisipatif, dan pendekatan penyelesaian masalah yang konstruktif dapat menjadi model yang efektif untuk meningkatkan kinerja tim dalam konteks pemerintahan daerah. Namun perlu perhatian lebih pada aspek teknis dan logistik agar potensi gangguan dapat diminimalkan. Rekomendasi ke depan adalah penguatan pelatihan teknis dan peningkatan sistem monitoring agar setiap detail pelaksanaan kegiatan dapat terkelola dengan baik.

## KESIMPULAN

Sinergi antara Analis Kebijakan Ahli Muda dan Anggota tim sangat krusial dalam menyukseskan agenda keagamaan pemerintah daerah, mulai dari Isra Mi'raj hingga MTQ, yang menunjukkan peran ganda mereka sebagai pelaksana teknis dan pengatur logistik. Gaya kepemimpinan partisipatif yang diterapkan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda terbukti efektif dalam menjaga stabilitas dan moral tim, di mana proses pengambilan keputusan didasarkan pada musyawarah dan masukan bersama, meskipun otoritas akhir tetap berada di tangan pimpinan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah ketidaktepatan Anggota dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung seperti tenda dan sound system, sebuah isu logistik yang berpotensi menghambat kelancaran acara. Respon pimpinan terhadap masalah ini sangat adaptif terhadap gaya partisipatifnya, yakni melalui dialog, mencari akar masalah, memberikan solusi konstruktif, dan memberikan nasihat yang bertujuan untuk pembinaan jangka panjang. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi antara tugas yang spesifik dan gaya kepemimpinan yang suportif berhasil menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, namun memerlukan perbaikan berkelanjutan pada aspek detail teknis operasional.

Sebagai Saran yang dapat diajukan, pertama, tim perlu secara sistematis meningkatkan mekanisme checklist dan audit internal untuk pengecekan fasilitas dan logistik sebelum, selama, dan setelah acara. Hal ini akan meminimalisir risiko ketidaktepatan dan memastikan bahwa semua peralatan pendukung berfungsi optimal dan terawat. Kedua, Analis Kebijakan Ahli Muda disarankan untuk mengembangkan program pelatihan singkat atau refreshment fokus pada manajemen logistik dan peningkatan ketelitian, bukan sebagai sanksi melainkan



sebagai investasi dalam kompetensi anggota. Ketiga, meskipun pendekatan musyawarah sudah baik, disarankan agar penetapan solusi yang disepakati dari musyawarah tersebut diakhiri dengan penugasan tanggung jawab yang sangat jelas (akuntabilitas) kepada anggota tertentu, sehingga setiap individu merasa memiliki kepemilikan dan tanggung jawab penuh untuk mencegah terulangnya masalah yang sama, yang pada akhirnya akan memperkuat efektivitas gaya kepemimpinan partisipatif tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Azmy, Ahmad. (2021). Teori dan Dasar Kepemimpinan. Makassar: Mitra Ilmu.
- Gani, Sastrawati. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Partisipatif Terhadap Perilaku Kerja Pegawai Pada Dinas Penanaman Modal ESDM Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis (JIMB)*, 5(2).
- Gultom, Syawal, Darwin, Ir., Sinaga, Osberth, & Sihombing, Dionisius. (2025). Kepemimpinan Teori & Praktik. Biru- biru: CV Sangpena Media.
- Masruhin, Salis, & Raudhoh. (2022). Kepemimpinan para partisipatif: Literature review. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 8.
- Mulyadi Chandra, Daryoto. (2024). Teori dan gaya kepemimpinan dalam membentuk karakter dan SDM yang unggul. *Jurnal Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2.
- Mulyadi, Bagas, dkk. (2024). Kepemimpinan Efektif: Strategi Memimpin Tim Menuju Kesuksesan. Sleman, Yogyakarta: CV Selfietera Indonesia.
- Nurhayani, Syaifudin, Muhammad, & Adriani, Tuti. (2023). Peran pemimpin peran kepemimpinan dalam membangun tim. *Jurnal Al Mujahadah: Islamic Education Journal*, 1.
- Wulandari, Anna, & Mulyanto, Heru. (2024). Kepemimpinan. Cikarang: PT Kimshafi Alung Cipta.
- Amirullah. (2015). Kepemimpinan dan Kerja Sama Tim. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fahlevi, Mirdha. (2019). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif Terhadap Organizational Trust Dan Komitmen Organisasi Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, 3(2).